

SKRIPSI

KUASA ELIT DALAM POLITIK DESA PUNAGAYA, KECAMATAN BANGKALA

KABUPATEN JENEPONTO



OLEH :

NADIRA ULFANISA

E041191024

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
KUASA ELIT DALAM POLITIK DESA PUNAGAYA, KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO

Disusun Dan Di Ajukan Oleh :

Nadira Ulfanisa

E041191024

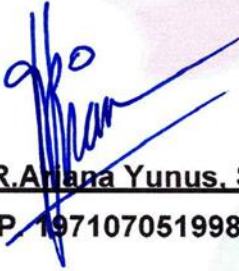
Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal : 12 Oktober 2023

Pembimbing Utama

Menyetujui,

Pembimbingn Pendamping


DR. Ariana Yunus. S.IP.M.Si.

NIP. 197107051998832002


Haryanto. S.IP..MA.

NIP. 19861008 20190310009

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub. M.Si., Ph.D.

NIP. 19621231 199003 1023

HALAMAN PENERIMAAN

Disusun dan Diajukan Oleh :

Nadira Ulfanisa

E041191024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Ariana, S.IP,M.Si.

(.....)



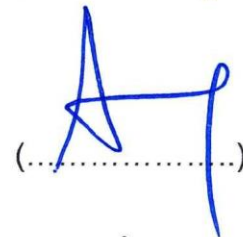
Sekretaris : Haryanto,S.IP,MA

(.....)



Anggota : Prof.Dr. Phil. Sukri, SIP.,M.Si..

(.....)



Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADIRA ULFANISA
NIM : E041191024
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Peran Elit dalam politik Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilantulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Oktober 2023

 
(NADIRA ULFANISA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sang ilahi atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Elit dalam politik Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”. Tak lupa juga, penulis hanturkan shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda sang kekasih Allah SWT. Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

Skripsi ini saya persembahkan pertama-tama kepada dua orang yang sangat berjasa dan berperan besar di dalam hidup saya yaitu kedua orang tua saya, Bapak Baharuddin dan Ibu Hj. Irma Yani yang telah menjadi orang tua terhebat, yang bekerja keras mencari nafkah, yang selalu sabar mendidik dan memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Dan tak lupa juga, terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.SI dan Bapak Haryanto, S.IP, M.A yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menulis skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghanturkan

beribu terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si., sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Wakil Dekan I Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik bidang akademik dan kemahasiswaan, Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak Sutamin, Pak Herman dan Ibu Irma.
3. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan dan Alumni, Bapak Dr. M Iqbal Sultan, M.Si., beserta segenap jajaran staf.
4. Wakil Dekan III Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si beserta segenapjajaran staf.
5. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., yang telah membantu kelancaran administrasi akademik Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Gustiana Kambo, M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP.,

M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.Ip., Bapak Prof. Dr. Muhammad M.Si., Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan

6. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati, S.E., yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
7. Kepada Cilop, Arifin, Andres, Tamar, Jusni, Eka, Pita yang telah kebersamaan dalam penyelesaian skripsi ini
8. Kepada sahabat saya Asfila Abbas yang telah menemani dalam suka maupun duka dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 25 Oktober 2023

(Nadira Ulfanisa)

ABSTRAK

Nadira Ulfanisa, E041191024. Peran Elit dalam politik Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Di bawah bimbingan Ibu Ariana dan Bapak Hariyanto.

Momentum transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi yang kemudian ditandai dengan kebijakan otonomi daerah sangat dimanfaatkan oleh kedua kelompok elit untuk berkuasa secara penuh di daerahnya baik berkontestasi untuk menjadi elit pemenang maupun bersinergi satu sama lainnya pada umumnya disatukan melalui jalur perkawinan. Maka tidaklah mengherankan kemudian otonomi daerah melahirkan adanya raja-raja kecil di daerah. Peran elit politik dalam pemilihan Kepala Desa dapat dilihat dari pemilihan Kepala Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang dimana Kepala Desa punagaya Sebelum dijabat oleh Andi Pangeran, Jabatan Kepala Desa di pegang oleh Mulyadi Mustamu yang notabenehnya merupakan keluarga bangsawan atau Karaeng, dan juga merupakan saudara dari Andi Pangeran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif Analisis data primer dalam penelitian ini melalui proses wawancara mendalam dengan mewawancarai narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi terkait peran elit dalam pemilihan Kepala Desa di Desa punagaya. Dalam menganalisis hasil wawancara pada penelitian ini, penulis menggunakan teori elit, teori praktik bourdieu dan konsep pemilihan Kepala Desa untuk melihat kemuculan elit dan peran elit dalam pemilihan Kepala Desa Punagaya.

Hasil penelitian ini menemukan adanya peran elit dalam pemilihan Kepala Desa, yang dimana kemunculan elit yang ada di desa punagaya di pengaruhi oleh budaya kerajaan dan kepercayaan masyarakat di Desa Punagaya terhadap budaya dan struktur masyarakat yang berasal dari tradisi kerajaan dimasa feodalisme dengan mempercayai Karaeng sebagai orang yang harus memimpin Desatersebut. selain itu penelitian ini juga menemukan peran yang dilakukan oleh elit pada pemilihan Kepala Desa Punagaya berperan dalam tiga aspek yaitu pemerintahan Desa, Peran di dalam Masyarakat adat, dan peran Dalam perekonomian masyarakat di Desa Punagaya.

Kata Kunci : Elit Politik , Pemilihan Kepala Desa, Budaya Politik

ABSTRACT

Nadira Ulfanisa, E041191024, The Role of Elites in the Punagaya Village Head Election, Bangkala District under the guidance of Ms. Ariana and Mr. Hariyanto.

The momentum of the transition from authoritarianism to democracy, which was then marked by the regional autonomy policy, was greatly utilized by the two elite groups to fully rule in their regions, both contesting to become the winning elite and synergizing with each other, which were generally united through marriage. It is not surprising then that regional autonomy gave birth to the existence of small kings in the regions. The role of political elites in the election of the Village Head can be seen from the election of the Village Head in Punagaya Village, Bangkala Subdistrict, Jeneponto Regency. Before being held by Andi Pangeran, the position of Village Head was held by Mulyadi Mustamu, who is a noble family or Karaeng, and is also the brother of Andi Pangeran.

This research uses qualitative research methods with descriptive type. Primary data analysis in this study is through an in-depth interview process by interviewing sources who are considered to be able to provide information related to the role of the elite in the election of the Village Head in Punagaya Village. In analyzing the results of interviews in this study, the authors used elite theory, Bourdieu's practice theory and the concept of Village Head elections to see the emergence of elites and the role of elites in the election of the Punagaya Village Head.

The results of this study found the role of the elite in the election of the Village Head, where the emergence of the elite in Punagaya Village was influenced by the royal culture and the belief of the people in Punagaya Village in the culture and structure of society derived from the royal tradition during feudalism by trusting Karaeng as the person who must lead the village. besides that this study also found that the role played by the elite in the election of the Punagaya Village Head played a role in three aspects, namely village government, role in indigenous peoples, and role in the community economy in Punagaya Village.

Keywords: Political Elites, Village Head Election, Political Culture

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitiaan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Teori Elit.....	7
2.2. Teori Praktik Bourdeau.....	10
2.2.1. Modal	12
2.2.2. Arena	14
2.3. Konseptualisasi Pemilihan Kepala Desa	16
2.4. Telaah Pustaka.....	18
2.5. Kerangka Pemikiran	19
2.6. Skema Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.2. Dasar dan Tipe Penelitian	21
3.3. Sumber Data dan Informan Penelitian	23
3.1.1. Data Primer.....	23
3.1.2. Data Sekunder.....	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data	24
3.5. Teknik Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	28
4.1. Sejarah desa punagaya.	28
4.2. Kondisi Geografis.	29

4.3.	Perekonomian Masyarakat Desa Punagaya.....	30
4.4.	Pemerintahan Desa.....	31
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		32
5.1.	Kemunculan Elit Lokal Di Desa Punagaya.....	32
5.2.	Peran Elit Penentu dalam mempertahankan kekuasaan Andi Pangeran. 36	
5.2.1.	Peran Dalam Pemerintahan Desa.....	37
5.2.2.	Peran di Masyarakat.....	43
5.2.3.	Peran pada ekonomi masyarakat.....	45
5.2.4.	Peran Dalam Pemilihan Kepala Desa.....	51
BAB VI PENUTUP.....		55
6.1.	Kesimpulan.....	55
6.2.	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....		57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Dengan demikian, frase atau konsep demokratisasi Desa berarti upaya menggerakkan demokrasi dalam kekhasan Desa itu sendiri. Demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi Desa.¹

Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia. Dengan otonomi yang dimilikinya, maka desa di Indonesia memiliki begitu banyak keragaman, yang sadar atau tidak telah menjadi sumber kekayaan kultural bagi Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pemerintah membuat undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang otonomi desa, Terbentuknya undang-undang otonomi desa ini, kemudian membuat desa mampu menentukan pemerintahannya sendiri dan memilih kepala desa nya sendiri secara demokratis.

Pemilihan kepala desa merupakan wujud dari demokrasi lokal dalam wilayah pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa diharapkan mampu membawa perubahan bagi perkembangan dan pertumbuhan desa. Pada pemilihan kepala desa

¹ Naeni Amanulloh. *Demokratisasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Jakarta: 2015. Hlm. 9

masyarakat harus memiliki hak dan kewajiban warga Negara agar pada pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan lancar dan demokratis. lebih lanjut pemilihan kepala desa secara langsung diharapkan dapat melahirkan kepala desa terpilih sesuai dengan kehendak rakyat didesa²

Tumbuhnya “politik baru” pasca otonomi daerah dan perubahan lanskap politik di level lokal menghasilkan elit-elit informal yang menjamur menjadi elit formal politik. dan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) atau pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) adalah sebagai arena munculnya para elit lokal tersebut. Para elit informal tersebut berebut untuk menjadi elit politik formal karena memiliki posisi istimewa untuk terus dapat menguasai sumber-sumber kekuasaan politik dengan menggunakan dukungan-dukungan dari klien, kroni, maupun relasi-relasi bisnis mereka³

Berlakunya sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomidaerah, menghasilkan elit – elit lokal yang berkuasa dengan cara menggunakan simbol-simbol kekuasaannya untuk memobilisasi dukungan rakyat , guna menguasai seluruh aspek kehidupan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik. Kemampuan elit lokal tersebut di dukung oleh kekayaan dan kemampuan politiknya untuk memperoleh suara, memanipulasi, melakukan tawaran dan memobilisasi masyarakat berdasarkan asal asul keturunan dan hukum

² Jamil Ismail. Skripsi. Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Desa Barakkae Kecamatan lamuru kabupaten bone. hlm 1

³ scolarc.unand.ac.id runtuhnya rezim orde baru hal 3

adat yang dipercayai oleh masyarakat setempat⁴

Momentum transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi yang kemudian ditandai dengan kebijakan otonomi daerah sangat dimanfaatkan oleh kedua kelompok elit untuk berkuasa secara penuh di daerahnya baik berkontestasi untuk menjadi elit pemenang maupun bersinergi satu sama lain yang pada umumnya disatukan melalui jalur perkawinan. Maka tidaklah mengherankan kemudian otonomi daerah melahirkan adanya raja-raja kecil di daerah⁵

Desa punagaya merupakan desa yang berada di kecamatan bangkala kabupaten jenepono, didalam sejarahnya desa punagaya pertamakali di pimpin oleh ropu daeng buyang. Setelah kepemimpinan ropu daeng buyang, desa punagaya kemudian di pimpin oleh batola karaeng narang yang kemudian dilanjutkan oleh H. Mulyadi Mustamu.

Kepemimpinan H. mulyadi mustamu kemudian menjadi cikal bakal meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa punagaya , hal ini terjadi karena pada kepemimpinan H.Mulyadi mustamu desa punagaya kemudian menjadi tempat pembangunan pembangkit listrik tenaga uap sejak tahun 2008, hal ini tidak lepas dari peran H. mulyadi Pembangunan PLTU ini kemudian menjadi tempat mata pencaharian warga punagaya dalam memenuhi kebutuhannya.

Keberhasilan H. mulyadi mustamu dalam meningkatkan kesejahteraan di desa punagaya melalui pembangunan Pltu mampu membangun kepercayaan masyarakat di desa punagaya terhadap dirinya. Selain itu, selain itu, sebagai menantu dari batolla karaeng

⁴ Ibid hal 4

⁵ Ibid hal 4

Narang, mulyadi mustamu juga sangat di hormati oleh masyarakatnya. Hal ini terbukti dengan terpilihnya mulyadi mustamu sebagai anggota legislative kabupaten jenepono, dengan memperoleh dukungan dari mayoritas masyarakat desa punagaya. Hal ini terbukti dengan terpilihnya mulyadi mustamu sebagai anggota legislative kabupaten jenepono, dengan memperoleh dukungan dari mayoritas masyarakat desa punagaya.

Meskipun telah menjadi anggota legislative sosok mulyadi mustamu tetap menjadi aktor yang paling berpengaruh di desa punagaya. Hal ini dapat dilihat dengan keterpilihan Andi pangeran karaeng Rani sebagai kepala desa punagaya selama tiga periode. Hal ini tidak terlepas dari peran dari mulyadi mustamu sebagai sosok yang sangat di hargai di desa punagaya.

Berkat peran dari mulyadi mustamu inilah masyarakat kemudian memilih Andi pangeran karaeng rani sebagai kepala desa selama tiga periode. Masyarakat desa punagaya memilih andi pangeran karaeng rani karena melihat posisi mulyadi mustamu sebagai kakak dari andi pangeran karaeng rani . keberpihakan mulyadi mustamu dalam mendukung saudaranya membuat masyarakat desa punagaya juga ikut memilih andi pangeran sebagai kepala desa. Pada pemilihan tahun 2016 tersebut andi

Pangerang kemudian mencalonkan sebagai kepala desa punagaya menghadapi istrinya sendiri, hal ini di sinyalir karena tidak adanya calon atau kandidat lain yang mencalonkan untuk menghadapi andi pangerang pada pemilihan tersebut.

Hal ini semakin di pertegas pada pemilihan kepala desa

punagaya pada tahun 2021, dimana calon kepala desa punagaya di kuti oleh lima kandidat kepala desa yaitu andi pangerang memperoleh 1.114 suara , Sumarni 110 suara, Derniati 56 suara, Ahmad yani 306 suara, dan Andi mustamu Arfah memperoleh 1.075 suara. Adapun calon pada pemilihan tersebut terdapat dua orang saudara dari mulyadi mustamu Namun pada pemilihan tersebut mulyadi mustamu berpihak kepada andi pangeran karaeng rani .hal inilah yang kemudian membuktikan bahwa sosok mulyadi mustamu sangat berpengaruh didalam desa punagaya kecamatan bangkala kabupaten jeneponto. Keberpihakan mulyadi mustamu kepada andi pangeran menggambarkan bahwa mulyadi mustamu berusaha mempertahankan kekuasaannya didesa punagaya.

Berdasarkan latarbelakang diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan **judul Kuasa Elit Dalam Politik Desa Punagaya.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis kemudian membatasi rumusan masalah yang akan diteliti, menjadi :

Bagaimana peran Elit Penentu dalam mempertahankan kekuasaan Andi pangerang karaeng rani pada politik desa punagaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor keberpihakan Elit Dalam mempertahankan kekuasaan Andi Pangerang Pada Politik Desa

Punaga Kecamatan Bangkala Kabuptaen Jeneponto.

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari pengkajian ini. Peneliti membagi manfaat-manfaat tersebut menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

A. Manfaat Teoritis

1. Pengkajian ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah Ilmu Politik khususnya dalam keterlibatan elit dalam pemilihan kepala desa .
2. Pengkajian ini dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah baru dalam melihat bagaimana pengaruh dinasti politik dalam pemilihan kepala desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

B. Manfaat Praktis

Pengkajian ini diupayakan dapat menjadi bahan acuan dalam memahami peran elit dan faktor keterlibatan elit dalam kontestasi pemilihan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Membahas tentang pisau analisis yang akan di gunakan dalam menganalisis hasil dan pembahasan tentang keterlibatan Elit dalam mempertahankan kekuasaan Andi Pangeran. Adapun teori atau konsep yang digunakan ialah, Teori Elit, Teori Praktik Bourdieu, dan konsep pemilihan kepala desa.

2.1. Teori Elit

Secara umum elit adalah suatu kelompok masyarakat minoritas yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Elit merujuk pada seseorang atau sekelompok yang mempunyai keunggulan- keunggulan untuk menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh. Dalam studi sosial golongan minoritas yang berada pada posisi yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elit. Dalam suatu masyarakat selalu dijumpai satu kelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, walaupun perubahan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang ia atau mereka mainkan. Individu atau sekelompok individu inilah yang lazim disebut elite.⁶

Robert D. Putnam menyatakan bahwa secara umum ilmuwan sosial membagi dalam tiga sudut pandang. Pertama, sudut pandang struktur atau posisi. Pandangan ini lebih menekankan bahwa kedudukan

⁶ Sartono Kartodirdjo (Ed), Pesta Demokrasi Di Pedesaan (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), Hal. 131.

elit yang berada pada lapisan atas struktur masyarakat yang menyebabkan mereka akan memegang peranan penting dalam aktivitas masyarakat. Kedudukan tersebut dapat dicapai melalui usaha yang tinggi atau kedudukan sosial yang melekat, misalnya keturunan atau kasta.⁷

Elite menurut Suzzana Keller, berasal dari kata eligere, yang berarti orang –orang yang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok atau kelompok kecil orang-orang yang terpendang dan berderajat tinggi, Dalam arti umum elite menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Dengan kata lain, elite adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan dari pada warga masyarakatlainnya sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya.⁸

Suzanne Keller membagi tipe kepemimpinan sosial dapat dibagi menjadi:

1. Kasta penguasa Membina orang melalui reproduksi biologis dan dengan prestise yang tinggi. Kasta penguasa terbentuk terpisah dengan agama, kekerabatan, bahasa, daerah tempat tinggal, kedudukan ekonomi serta aktivitas jabatan.
2. Aristokrasi Terbentuk melalui ikatan keluarga melalui kekerabatan dan kekayaan, aristokrasi menyukai jabatan politik dan perang Berdasarkan analisa elite Putnam dan Suzanne Keller seperti diurai diatas yang dimaksud dengan elite penentu alternatifnya adalah :

⁷ Jayadi Nas, Konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal, hal 23

⁸ Ibid hal 24

- a) Orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu organisasi;
- b) Orang yang memiliki pengaruh dan reputasi besar dalam organisasi dibanding orang lain;
- c) Orang yang memiliki kontribusi besar dalam pengambilan keputusan dalam organisasi⁹

Dalam dinamika partai politik di aras lokal, kita temukan “orang kuat partai” yang secara individu memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan kebijakan partai. Orang inilah yang disebut Suzanne Keller sebagai elite penentu. Orang kuat partai ini secara individual mampu mengekspresikan pengaruh dan memastikan distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan bukan karena yang bersangkutan menduduki jabatan tertinggi di puncak piramida elite partai (ketua umum) tetapi meski hanya sebagai pengurus harian partai karena yang bersangkutan memiliki kapasitas pribadi yang mumpuni dibanding orang lain maka orang ini bisa menjadi orang penting di partai¹⁰

Orang kuat partai bisa hadir karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, kelebihanannya mengendalikan dan memerintah partai dapat dipergunakan untuk hal-hal positif tetapi juga mungkin diperuntukkan bagi tindakan-tindakan negatif. Ada dua jenis orang kuat partai, orang kuat yang buruk dalam memerintah partai (bad strongmen) dan orang kuat yang baik dalam memerintah partai (good strongmen). Bad strongmen adalah orang yang mengapresiasi kekuasaannya di partai dengan

⁹ Suzanne Keller, Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern, PT. Raja Grafindo persada :jakarta,1995,hlm 33.

¹⁰ Jainuri, " ORANG KUAT PARTAI DI ARAS LOKAL : BLATER VERSUS LORA DALAM PERCATURAN POLITIK.Hal 4.

cara-cara non demokratis, tidak menafsirkan kekerasan dan tidak menaburkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan good strongmen adalah orang kuat yang mengapresiasi kekuasaannya di partai dengan cara-cara demokratis, tidak menggunakan kekerasan dan tidak menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Dalam perkumpulan politik orang kuat ini tidak sendiri, ia dilingkupi oleh sekelompok orang yang bersatu dan memiliki karakter yang sama seperti tengara Pareto, Michel, Mosca : “Secara internal elite bersifat homogen, bersatu, memiliki kesadaran kelompok. Individu dalam kelompok elit itu saling mengenal dengan baik, memiliki latar belakang yang mirip dan memiliki nilai, kesetiaan, kepentingan yang sama”.¹¹

Pada umumnya, individu atau sekelompok individu yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu akan tampil sebagai pemimpin di masyarakatnya. Mereka akan mengarahkan individu-individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan keunggulan-keunggulan yang melekat pada dirinya. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, kelompok yang memimpin dan dipimpin akan muncul di masyarakat. Atau dalam istilah lain, kelompok yang memerintah dan kelompok yang diperintah.

2.2. Teori Praktik Bourdeau

Teori modal dicetuskan pertama kali oleh Pierre Bourdieu, disebutkan bahwa teori ini mempunyai ikatan erat dengan persoalan kekuasaan. Oleh karenanya pemikiran Bourdieu terkonstruksi atas persoalan dominasi. Dalam masyarakat politik tertentu persoalan dominasi adalah persoalan utama sebagai salah satu bentuk aktualisasi

¹¹ Ibid hal 9

kekuasaan. Pada hakikatnya dominasi dimaksud tergantung atas situasi, sumber daya (kapital) dan strategi pelaku.¹²

Konsepsi atas teori modal Bourdieu tidak bisa dilepaskan dari konsep dominasi lainnya. Sehingga pemikiran Bourdieu ini ada keterkaitan dengan konsep kekuasaan yang lain, yakni habitus & ranah (arena). Habitus dalam teori sosiologi dimaksudkan sebagai struktur mental kognitif yang menghubungkan manusia dengan dunia sosial. Manusia dianggap dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang digunakan untuk melahirkan persepsi, pemahaman, apresiasi, dan evaluasi atau kemampuan menilai terhadap dunia sosial.¹³

Habitus Dalam bahasa latinnya, habitus bisa berarti kebiasaan (habitual), penampilan diri (appearance) atau bisa pula menunjuk pada tata pembawaan yang terkait dengan kondisi tipikal tubuh. Habitus mendasari terjadinya kehendak merespon, merasa, berpikir, bertindak dan bersosialisasi dengan individu lain, lingkungan diluar diri maupun perlengkapan yang menyertai diri. Habitus membimbing aktor untuk memahami, menilai, mengapresiasi tindakan mereka berdasarkan pada skema atau pola yang dipancarkan dunia sosial.¹⁴

Dalam hal ini habitus dianggap sebagai suatu kewajaran dalam pikiran manusia atau sebagai akal sehat. Habitus mencoba menyebutkan bahwa manusia bertindak secara wajar dan objektif dalam merefleksikan diri dalam struktur kelas. Seperti kelompok usia, jenis kelamin, dan kelas sosial. Untuk itulah habitus sering disebut sebagai upaya menstrukturkan

¹² Ibid hal 10

¹³ Abd. Halim, Politik Lokal; Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Yogyakarta: LP2B, 2014)

¹⁴ Ibid hal 582

struktur dalam dunia sosial.¹⁵

Habitus merupakan “struktur-struktur yang dibentuk” dan “struktur- struktur yang membentuk”. Disatu sisi, habitus berperansebagai sebuah struktur yang membentuk kehidupan sosial. Sedangkan di sisi lain, habitus dipandang sebagai struktur yang dibentuk oleh kehidupan sosial.dalam struktur-struktur yang dibentuk menjelma menjadi struktur struktur yang membentuk konsep habitus, terletak dalam fakta bahwa suatu kecenderungan membawa pola tertentu secara tidak sadar menjadi sebuah kebiasaan. Habitus membimbing aktor untuk memahami dan menilai tindakanyang terbentuk dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, habitus merupakan konstruksi pengantar, bukan konstruksi penentu. Maka menurut Bourdieu, aktor juga mengkombinasikan antara habitus, modal dan arena. Modal dalam teori Bourdieu terbagi atas empat yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik.Modal ekonomi yang dimaksud adalah berapa banyak modal finansial yang dimiliki sang aktor.¹⁶

2.2.1. Modal

Modal menurut Pierre Bourdieu terdapat 4 modal yang menjadi pertaruhan dalam sebuah arena yakni modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik. Fungsi modal, bagi Bourdieu adalah relasi sosialdalam sebuah sistem pertukaran, yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu

¹⁵ Ibid hal 583

¹⁶ Ibid hal 583

yang langka, yang layak dicari dalam bentuk sosial tertentu. Beragam jenis modal dapat dipertukarkan dengan jenis modal-modal lainnya. Penukaran yang paling dramatis adalah penukaran dalam bentuk simbolik. Sebab dalam bentuk inilah bentuk modal-modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang menjadi mudah dilegitimasi.¹⁷

Jenis-jenis modal terbesar dalam ranah sosial menurut Bourdieu, modal bisa digolongkan kedalam empat jenis :

1. Modal ekonomi mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh) ataupun materi (pendapatan dan benda-benda) serta uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.
2. Modal budaya adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Termasuk modal budaya antara lain kemampuan menampilkan diri di depan publik, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu dari hasil pendidikan, juga sertifikat (gelar kesarjanaan). Modal kebudayaan adalah seperti pendidikan.
3. Modal simbolik segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi yang terakumulasi sebagai bentuk modal simbolik. Modal simbolik yakni sesuatu yang bisa dilihat oleh masyarakat.

¹⁷ Fauzy fashri, menyikap kuasa simbol: Aproropriasi reflektif. pemikiran pierre bourdieu. (jogjakarta: joxtapose, 2007). hal. 62

4. Modal sosial merujuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Modal sosial adalah seberapa luas jaringan aktor baik dari individu maupun kelompok-kelompok tertentu seperti keluarga yang memiliki banyak jaringan .

Modal-modal yang dimaksud diatas yakni modal yang memungkinkan kita untuk mendapatkan kesempatan- kesempatan di dalam hidup. Ada banyak jenis kapital, seperti modal intelektual (pendidikan), modal ekonomi (uang), dan modal budaya (latar belakang dan jaringan). Modal bisa diperoleh, jika orang memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya. Habitus membaca, menulis, dan berdiskusi akan menghasilkan modal intelektual dan modal budaya. Sementara, sikap rajin bekerja dan banyak jaringan bisnis akan menghasilkan modal ekonomi. Modal bukanlah sesuatu yang mati, melainkan hidup dan bisa diubah. Karena memiliki modal intelektual (pendidikan), orang bisa bekerja sebagai pendidik, dan memiliki uang (modal ekonomi) untuk hidup. Modal intelektual juga bisa diubah menjadi modal budaya (jaringan yang banyak), sehingga bisa memperkaya modal intelektual itu sendiri.

2.2.2. Arena

Arena adalah jaringan relasi antar posisi objektif di

dalamnya keberadaan relasi-relasi ini terpisah dari kesadaran dan kehendak individu relasi tersebut bukan interaksi atau ikatan intersubjektif antara individu. Yang menduduki posisi bisa jadi merupakan agen atau institusi, dan mereka dihambat oleh struktur arena. Ada sejumlah arena semi otonom di dunia sosial (misalnya artistik, religius, perguruan tinggi), yang kesemuanya memiliki logika spesifik tersendiri dan semuanya membangun keyakinan di kalangan aktor tentang hal-hal yang mereka pertaruhkan di suatu arena.¹⁸

Bourdieu juga melihat arena, menurut definisinya sebagai arena pertempuran dan juga merupakan arena perjuangan struktur arena yang menopang dan mengarahkan strategi yang digunakan oleh orang-orang yang menduduki posisi ini untuk berupaya, baik individu atau kolektif, mengamankan atau mengingatkan posisi mereka dan menerapkan prinsip hierarkisasi yang paling cocok untuk produk mereka, arena adalah sejenis pasar kompetitif yang di dalamnya berbagai jenis modal digunakan dan dimanfaatkan, namun arena kekuasaan yang paling penting hierarkihubungan kekuasaan dalam arena politik berfungsi menstrukturkan semua arena lain.¹⁹

Teori Bourdieu menjelaskan bahwa (Habitus x Modal + Arena = Praktik). Dalam penjabaran tersebut dapat diartikan bahwa habitus dan modal adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan untuk kemudian mendapatkan satu tempat atau yang bisa disebut Bourdieu dengan istilah arena. Ketika seorang aktor

¹⁸ Ibid hal 63

¹⁹ Ibid hal 64

memiliki habitus dan modal yang baik maka besar kemungkinan sang aktor bisa memenangkan pemilihan dalam satu arena (wilayah)

2.3. Konseptualisasi Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades merupakan aktivitas politik yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang selenggarakan secara demokrasi.²⁰

Pemilihan kepala desa tidak dapat dipisahkan oleh perkembangan dinamika politik serta budaya politik yang terjadi dalam suatu desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Peraturan terkait pemilihan kepala desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara transparan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala desa diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa (BPD)

²⁰ Muhammad Ivan Saputra. PERILAKU POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.hal36

dengan membentuk panitia pelaksana. BPD harus memberitahukan kepala desa mengenai berakhirnya masa jabatan kepala desa paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Adapun syarat – syarat calon kepala desa yang tertuang dalam undang– undang no 6 tahun 2014 tentang desa sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan

pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

10. berbadan sehat

11. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.²¹

2.4. Telaah Pustaka

Salah satu cara penyusunan skripsi ini berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang berupa karya tulis terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Hal itu untuk menghindari penelitian berulang tentang dinasti politik. Penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun.

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusun dalam melakukan penelitian ini seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moh. Hafis yang berjudul "dinasti politik (reproduksi kekuasaan dalam dinasti bani husein di desa sera tengah, secara spesifik skripsi ini membahas tentang bagaimana reproduksi kekuasaan bani husein di desa sera tengah, skripsi ini juga menggunakan teori elit Robert D Putnam. Penelitian selanjutnya ditulis oleh Ayustina yang berjudul Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, penelitian ini secara spesifik membahas tentang

²¹ Ibid hal 39

kemenangan calon kepala desa karena adanya hubungan kekeluargaan. Sementara yang membedakan penelitian yang penulis lakukan ialah pada penelitian ini penulis mengkaji fenomena peran elit di dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Punagaya yang telah dikuasai oleh satu keluarga yang merupakan garis keturunan dari kerajaan bangkala di kabupaten Jeneponto, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang peran Elit Penentu dalam mempertahankan kekuasaan Andipangeran Karaeng Rani pada politik desa Punagaya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori praktik yang dikemukakan oleh Bourdieu untuk menganalisis fenomena tersebut.

2.5. Kerangka Pemikiran

Elit adalah kelompok ataupun individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, walaupun perubahan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang ia atau mereka mainkan. Kemunculan para elit dalam demokrasi lokal tersebut lazim dikenal dalam istilah reorganisasi kekuasaan. Reorganisasi ini diartikan sebagai kembalinya pengaruh kekuasaan politik elit lokal ke dalam era demokrasi.

Sosok Mulyadi Mustamu sebagai kepala desa sebelumnya merupakan orang yang sangat berpengaruh di Desa Punaga. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan membangun Desa Punaga, selain itu, sebagai menantu dari Batolla Karaeng Narang, Mulyadi Mustamu juga sangat dihormati oleh masyarakatnya. Keberpihakan Mulyadi Mustamu dalam mendukung Andi Pangeran yang notabene merupakan saudara kandungnya membuat masyarakat Desa Punagaya

juga ikut memilih Andi Pangeran sebagai kepaladesa Punaga pada pemilihan kepala desa tahun 2021. Dalam menganalisis fenomena ini, penulis kemudian menggunakan teori elit dan Reproduksi kuasa dalam penelitian ini untuk melihat kekuatan atau pengaruh mulyadi mustamu sebagai orang yang sangat dihargai oleh masyarakat desa punagaya.

Selain itu menggunakan konsep pemilihan kepala desa untuk melihat proses terjadinya pemilihan kepala desa di Desa Punaga. Penelitian ini kemudian menggunakan metode kualitatif guna melihat dan melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat desapunagaya, sehingga dapat membantu penulis dalam mendapatkan data yang kredibel.

2.6. Skema Pemikiran

